

PENERAPAN PILIHAN SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

FADLON HUSEIN

ABSTRAK

Pesatnya pembangunan tentu harus diimbangi dengan peran pemerintah dalam menyediakan berbagai bentuk berupa barang, jasa, namun berbagai penyimpangan kerap terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Seringnya terjadi penyimpangan atas ketentuan pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat diindikasikan dari banyaknya penanganan tindak pidana korupsi. Untuk menentukan apakah sanksi pidana atau sanksi administrasi yang diterapkan diperlukan pemeriksaan/audit oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa Audit Investigatif yang terdiri dari Audit Finansial dan Audit Performa untuk menentukan apakah ada kerugian negara atau tidak dan menentukan apakah kerugian keuangan negara tersebut disebabkan oleh perbuatan yang melawan hukum atau tidak. Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi 2. Untuk menganalisis kriteria Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hukum Keuangan Publik 3. Untuk menganalisis menentukan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Dengan metode penelitian yuridis normatif diketahui bahwa 1. Dasar pertimbangan unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan barang dan jasa meliputi Setiap orang, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dan Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan. 2) Kriteria Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hukum Keuangan Publik yaitu: a. Kekurangan semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, b. Kekayaan Negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, c. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; d. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Menentukan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana yaitu dengan melihat dugaan penyimpangan dalam tindakan hukum administrasi negara tersebut memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum atau tidak melalui Audit Investigatif yang dilakukan oleh BPK.

Kata Kunci : Administrasi, Pidana, Pengadaan

**IMPLEMENTATION OF CHOICE OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS
AND CRIMINAL SANCTIONS IN PROCUREMENT OF
GOVERNMENT SERVICES IT POTENTIALLY
DISADVANTAGES STATE FINANCE**

FADLON HUSEIN

ABSTRACT

The rapid development must be balanced with the role of government in providing various forms of goods, services, but various irregularities often occur in the process of procurement of goods and services Government. The frequent occurrence of irregularities on the provision of goods / services Government can be indicated from the many handling of corruption. To determine whether a criminal sanction or administrative sanction is applied, an audit by an authorized institution, namely the Supreme Audit Board (BPK), is an Investigative Audit consisting of a Financial Audit and a Performance Audit to determine whether there is a state loss or not and determining whether the state financial loss is caused by an unlawful act or not. The purpose of this study is 1. To know the basic consideration elements of the state financial losses in cases of Crime Acts of Co-op 2. To analyze the criteria of State Financial Losses based on Public Finance Law 3. To analyze determine the irregularities in the procurement of goods / services government subject to administrative sanctions or criminal sanctions. With the normative juridical research method it is known that 1. The basic consideration of the element of financial loss of the State in the case of Corruption in the Procurement of goods and services includes Every person, In order to benefit himself or others or a corporation, Abusing use of existing powers, opportunities or means to him or her due to position or position, which may be detrimental to the finances of the State or the economy of the country and As a person who commits or participates in doing so. 2) Criteria of State Financial Losses based on Public Finance Law are: a. Lack of all rights and obligations of the State which can be assessed by money, b. State assets / territories which are self-managed or by others in the form of money, securities, accounts receivable, goods, and other rights which can be assessed by money, c. Wealth of other parties controlled by the government in the framework of the administration of governmental duties and / or public interest; d. Wealth of other parties obtained by using the facilities provided by the government. Determining irregularities in the procurement of goods / services of government subject to administrative sanctions or criminal sanctions is to see allegations of irregularities in legal action the state administration meets the criteria of action against the law or not through Investigative Audits conducted by BPK.

Keywords : Administration, Criminal Procurement